

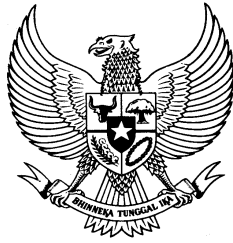


**KEPALA DESA AIK PELEMPANG JAYA
KABUPATEN BELITUNG**

**PERATURAN DESA
AIK PELEMPANG JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)
DI DESA AIK PELEMPANG JAYA**



KEPALA DESA AIK PELEMPANG JAYA
KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DESA AIK PELEMPANG JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI DESA AIK PELEMPANG JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AIK PELEMPANG JAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan penyebarluasan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Desa yang ditetapkan dalam peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Belitung tentang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 61);

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIK PELEMPANG JAYA
DAN
KEPALA DESA AIK PELEMPANG JAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA AIK PELEMPANG JAYA KECAMATAN TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG TENTANG PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO DESA DALAM PELAKSANAAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI DESA AIK PELEMPANG JAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Belitung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang

diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Undur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Posko Desa adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat Desa untuk penanganan Covid-19 di Desa; dan
12. Satuan Tugas Covid-19 (Satgas Covid-19) Desa adalah pelaksana tugas penanganan Covid-19 di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

PENERAPAN

Dalam penerapan pembatasan kegiatan Masyarakat level Mikro dibentuk Posko Desa untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (Covid-19) di Desa secara konsisten dan terkendali .

Pasal 3

KRITERIA PELAKSANAAN

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan Masyarakat di Desa dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas.
 - b. Zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas.
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus terkonfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka scenario

pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:

1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
3. Menutup sementara rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
4. Melarang kerumunan tanpa protokol kesehatan;
5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaannya bersama Rukun tetangga melaporkan kepada Kepala Desa serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

(2) Posko Desa secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan Covid-19 di Desa terdiri dari:

- a. Menyampaikan informasi tentang Covid-19 kepada masyarakat Desa;
- b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Desa/RW/RT;
- c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Desa;
- d. Mendeteksi penduduk di Desa yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Desa;
- e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
- f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan Covid-19; dan
- h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.

Pasal 4

TIM

Dalam pelaksanaan posko Desa diatur dalam tim yang terdiri dari:

- a. Tim pencegahan;
- b. Tim penanganan
- c. Tim pembinaan; dan
- d. Tim pendukung.

Pasal 5

STRUKTUR

Pelaksanaan posko Desa, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Kepala Desa;
- b. Wakil Ketua : Ketua BPD;
- c. Tim pencegahan yang terdiri dari unsur:
 - Unsur Dusun/Pelaksana Kewilayahan
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - Unsur Lembaga Adat Desa; dan
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.
- d. Tim penanganan yang terdiri dari unsur:
 - RT, RW
 - Dokter;
 - Bidan Desa;
 - Perawat;
 - Kader Kesehatan;
 - Kader Posyandu; dan
 - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Desa.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:
 - RT, RW
 - Satlinmas Desa;
 - Tokoh Agama;
 - Tokoh Adat; dan
 - Tokoh Masyarakat.

- f. Tim pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagai koordinator.

Pasal 6

Susunan posko Desa sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim posko Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan Covid-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Desa; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan Covid-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi Covid-19;
- c. Melakukan penulusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi Covid-19 melalui *test corona viruses disease* (Covid-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan Covid-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan Covid-19 sesuai kewenangan Desa, yaitu :

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa Covid-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7 pasal 8 dan pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam lampiran Peraturan Desa ini;

Pasal 13

Setiap warga Desa berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan protokol kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Desa atas adanya informasi terkait Covid-19.

Pasal 14

Setiap warga Desa dilarang:

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. Membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Desa.

Pasal 15

Setiap warga Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

1. Pembinaan adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
2. Pembinaan sosial seperti:
 - a. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
 - b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
 - c. Menjaga posko Desa dengan jumlah hari tertentu.
3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Desa ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas Babinsa puskesmas dan mitra Desa lainnya melalui Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas Covid-19 di tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan posko Desa dalam Penegakan Pelaksanaan Covid-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

Pasal 18

Peraturan desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangannya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Aik Pelempang Jaya
pada tanggal 1 April 2021

KEPALA DESA AIK PELEMPANG JAYA

REZALI

Diundangkan di Aik Pelempang Jaya
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DESA AIK PELEMPANG JAYA,

SIGIT SUTANTO

LEMBARAN DESA AIK PELEMPANG JAYA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DESA AIK PELEMPANG JAYA
KECAMATAN TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG : (92/DESA AIK
PELEMPANG JAYA/2021)

LAMPIRAN I PERATURAN DESA AIK PELEMPANG JAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 APRIL 2021
TENTANG : PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI DESA AIK PELEMPANG
JAYA

Format Penyelenggaraan Posko Desa di Desa:

a. Tim Pencegahan

1. Format Pendataan Warga (Format 1)
2. Rencana Kegiatan Pencegahan Covid-19 (Format 2)
3. Format Pendataan Kontak (Format 6)

b. Tim Penanganan

1. Format Pendataan Warga (Format 1)
2. Format Laporan Warga (Format 3)
3. Lembar Kesediaan Karantina Rumah/Perawatan di Rumah (Isolasi Diri)
(Format 5)
4. Data Pengadaan dan Distribusi Logistik (Format 7)

c. Tim Pembinaan

1. Format Pendataan Warga (Format 1)
2. Formulir Laporan Kegiatan (Format 4)
3. Formulir Pendataan Kontak (Format 6)

d. Tim Pendukung

1. Rencana Kegiatan Pencegahan Covid-19 (Format 2)
2. Format Pendataan Kontak (Format 6)
3. Data Pengadaan dan Distribusi Logistik (Format 7)
4. Format Pemantauan Kegiatan (Format 8)

FORMAT 1

Kode Kelompok Risiko Tinggi
(diisi oleh petugas kesehatan)

1	2	3
---	---	---

FORMULIR PENDATAAN WARGA

RT :

RW :

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : BELITUNG

PROVINSI : KEP. BANGKA BELITUNG

FORM ISIAN WARGA
(DIISI OLEH PENDATA)

NAMA :

NIK :

UMUR :

ALAMAT :

HARI/TGL :

TELP :

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah anda memiliki riwayat melakukan perjalanan domestik/internasional dalam 14 hari terakhir		
2	Apakah anda pernah bertemu dengan turis asing dalam 14 hari terakhir		
3	Apakah anda memiliki riwayat kontak (misalnya berjabat tangan, mengobrol lama, berada satu ruangan) dengan orang yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19		
4	Apakah saat ini anda mengalami demam		
5	Apakah saat ini anda ada gejala batuk		
6	Apakah anda merasakan nyeri di tenggorokan		
7	Apakah nafas anda terasa sesak		
8	Apakah anda sedang batuk/pilek		
9	Apakah anda memiliki riwayat penyakit sebagai berikut: a. Diabetes Mellitus (kencing manis) b. Hipertensi (darah tinggi) c. Jantung d. Ginjal e. Penyakit Paru/Asma f. Lain-lain		
10	Apakah saat ini anda sedang hamil		

Warga,

Pendata,

(.....)

(.....)

Keterangan:

1. Lansia (usia > 60 tahun)

2. Ibu hamil dengan atau tanpa penyakit penyerta

3. Usia produktif dengan riwayat penyakit penyerta

*KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

**disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMAT 2

RENCANA KEGIATAN PENCEGAHAN COVID-19

NO	TGL	KEGIATAN	SASARAN	MATERI/BAHAN	SALURAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1		Sosialisasi tentang Covid-19	Seluruh warga	Leaflet tentang Covid dari Puskesmas	Menggunakan pengeras suara		Ketua RT
2		Pendataan warga	Seluruh warga	Instrument pemantauan warga	Dari rumah ke rumah		Ketua RT, Kader, Babinsa, Babinkamtibmas, Karang Taruna
3		dst.					

Mengetahui,
Ketua RT,

(.....)

*KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020
**disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMAT 3

FORMULIR PEMANTAUAN WARGA

RT : RW :
DESA : KECAMATAN :
KABUPATEN : BELITUNG PROVINSI : KEP. BANGKA BELITUNG

**FORM ISIAN WARGA
(DIISI OLEH PENDATA)**

NAMA : NIK :
ALAMAT : TELP :

GEJALA KESEHATAN

Hari/Tanggal														
Keterangan	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Demam/meriang														
Batuk														
Sakit Tenggorokan														
Flu/Pilek														
Sakit kepala/pusing														
Sesak nafas														
Suhu badan														
Lain-lain														

Pelaksana,

Mengetahui,
Ketua RT,

(.....)

(.....)

*KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020
**disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMAT 4

FORMULIR PELAKSANAAN PEMBINAAN

RT : RW :
DESA : KECAMATAN :
KABUPATEN : BELITUNG PROVINSI : KEP. BANGKA BELITUNG

NO	TANGGAL	NAMA/KEGIATAN	KETIDAKPATUHAN PROTOKOL KESEHATAN*)	JENIS PEMBINAAN	KET
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
dst					

Pelaksana,

Mengetahui,
Ketua RT,

(.....)

(.....)

*Keterangan:
*) Tidak memakai masker, kerumunan, jadwal pembatasan kegiatan dan/atau lainnya
**) Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMAT 5

LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA RUMAH/
PERAWATAN DI RUMAH (ISOLASI DIRI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Jenis :
Kelamin :
Nomor HP :
Alamat

Menyatakan bersedia untuk dilakukan tindakan karantina **rumah/isolasi mandiri** (perawatan di rumah)* dan akan mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sampai tindakan ini dinyatakan berakhir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....2021

Petugas
Karantina,

Yang
Membuat pernyataan,

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Koordinator Pos Jaga
Desa,

(.....)

Ket:*coret salah satu

*KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

**disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMAT 6

FORMULIR PENDATAAN KONTAK (CONTACT LISTING)

Nomer Indek kasus Konfirmasi/ Primer ¹	Nomer identifikasi kontak ²	Nama lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Usia	No. HP	Alamat Lengkap				Kategori kontak ³	Tanggal kontak/ paparan	Hubungan dengan kasus	APD yang dipakai ⁴	Durasi ⁵
						Jalan	Desa	Kec.	Kab.					

Keterangan:

- ¹ Nomor Indeks kasus konfirmasi missal INOCOVID#1
- ² Nomor identifikasi kontak misalnya K1 merujuk pada kontak nomor 1
- ³ Kategori kontak : kontak rumah tangga, rumah sakit, puskesmas, klinik, rekan kerja, sosial (di restoran misalnya), sekolah, satu kendaraan
- ⁴ jika menggunakan APD terutama kategori kontak fasilitas layanan kesehatan (rumah sakit, IGD, puskesmas, klinik) : masker bedah, sarung tangan, masker N95 dll.
- ⁵ Perkiraan lama kontak misalnya 5 menit, 1 jam dsb.

*KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

**disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMAT 7

FORMULIR PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

RT : RW :
DESA : KECAMATAN :
KABUPATEN : BELITUNG PROVINSI : KEP. BANGKA BELITUNG

NO	TANGGAL	JENIS LOGISTIK	JUMLAH	KET LOGISTIK		PENERIMA	
				SUDAH	BELUM	NAMA	TTD

Pelaksana,

Mengetahui,
Ketua RT,

(.....)

(.....)

FORMAT 8

FORMULIR PEMANTAUAN KEGIATAN

RT : RW :
DESA : KECAMATAN :
KABUPATEN : BELITUNG PROVINSI : KEP. BANGKA BELITUNG

No	Kegiatan	Dilaksanakan		Hasil Pelaksanaan
		Ya	Tidak	
1	Penyusunan Perkades mengenai Penyelenggaraan Posko Desa			Perkades mengenai Penyelenggaraan Posko Desa Nomor : Tanggal :
2	Refocusing kegiatan dan anggaran untuk Penyusunan Perkades mengenai Perubahan Penjabaran APBDesa			Perkades mengenai Perubahan Penjabaran APBDesa Nomor : Tanggal :
3	Musyawarah Desa Penyusunan Perdes untuk keberlanjutan Penyelenggaraan Posko Desa			Perdes mengenai Penyelenggaraan Posko Desa Nomor : Tanggal :
4	Pendataan kesehatan warga Desa			Jumlah yang didata :rumahorang Jumlah isoman :rumahorang Jumlah yang sembuh:rumahorang
5	Faktor penyebab penularan Covid-19 dan Potensi wilayah			a) Faktor penyebab b) Potensi wilayah
6	Menyusun rencana kegiatan di masyarakat			
7	Pelaksanaan kegiatan			

Pelaksana,

(.....)

Mengetahui,
Ketua RT,

(.....)